

**DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
(DPPKB)**

RENCANA KINERJA TAHUNAN



Jl. Jenderal Sudirman 02, RT.04,
Kelurahan Melayu- Tenggara



dp2kbkabkukar@gmail.com



<https://dp2kb.kukarkab.go.id>



Dppkb Kutai Kartanegara



[dppkb_kutai_kartanegara](https://www.instagram.com/dppkb_kutai_kartanegara)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke khadirat ALLAH SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dapat diselesaikan. RKT tahun 2025 merupakan penjabaran dari aktivitas selama tahun Anggaran dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini, berpedoman kepada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 .

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2025, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance khususnya di lingkungan DP2KB Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini, semoga kita semua dapat bekerja sama dalam melaksanakan dan mencapai kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2025 dengan baik.

Plt. Kepala Dinas,



DAFIP HARYANTO, S.Sos.,M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip. 197009241990031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA.....	3
 BAB II RENCANA STRATEGIS DP2KB KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	 5
2.1. RENCANA STRATEGIS	5
2.2. TUJUAN DAN SASARAN	5
2.3. RENCANA KINERJA	8
 BAB III RENCANA ANGGARAN DAN PENDANAAN DPPK	 9
 BAB IV PENUTUP	 24

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DP2KB Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026	7
Tabel 2. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Tahun 2025	8
Tabel 3. Program dan Kegiatan Tahun 2025	9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sertabebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyeleggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka DP2KB Kabupaten Kutai Kartanegara menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2025 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan DP2KB Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) DP2KB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai dilingkungan DP2KB Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan kegiatannya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan DP2KB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini disusun mengacu berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dan Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 serta berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya dijabarkan dalam peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, adalah sebagai berikut :

Tugas Pokok : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan Tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Fungsi Organisasi :

1. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan administrasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Mengkoordinasikan penyusunan laporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

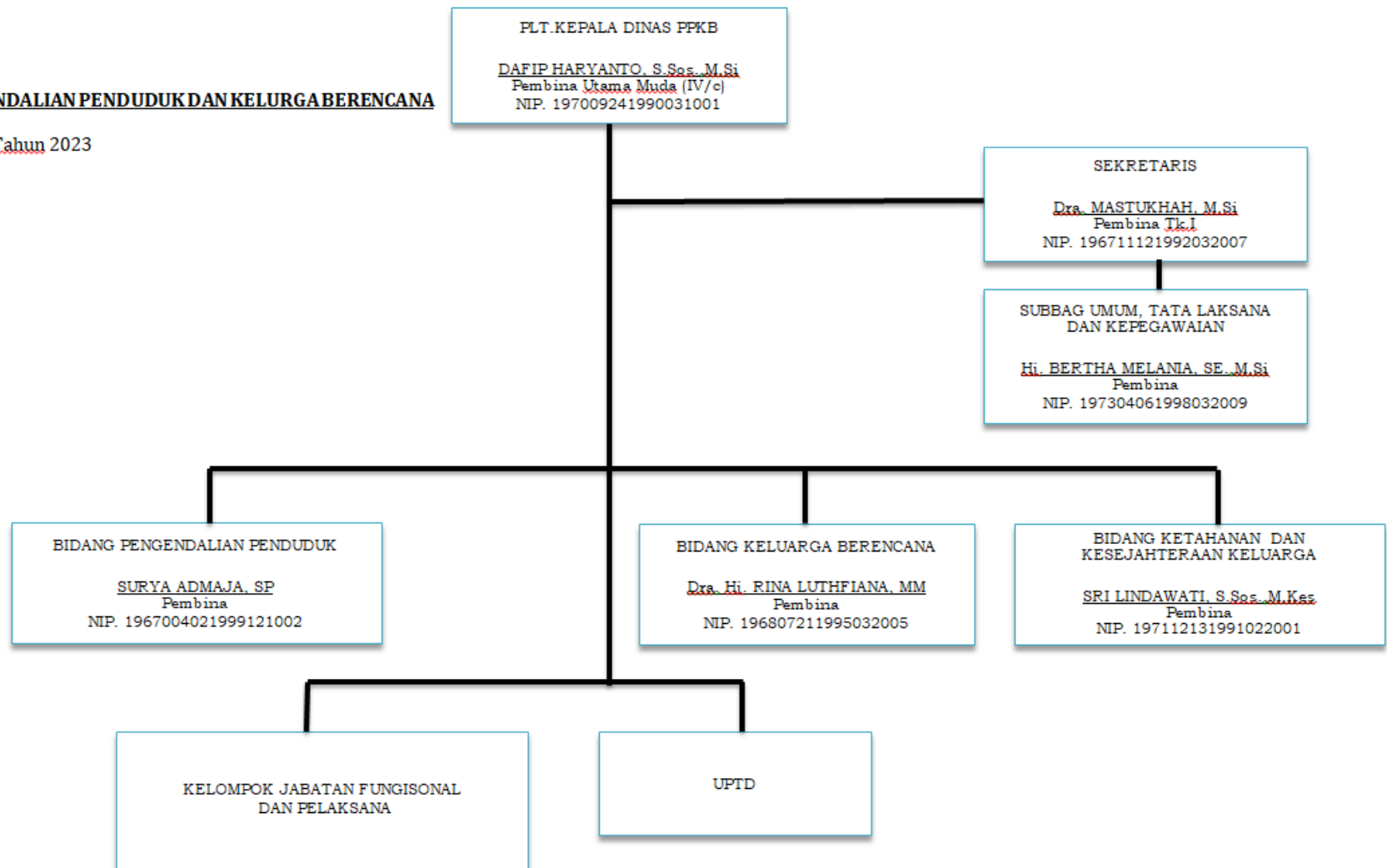
5. Memberikan penilaian kinerja secara berjenjang; dan
6. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati baik secara tertulis maupun lisan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Susunan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan:
 - Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan dan Kepegawain
 - Sub Bagian Penyusunan Program Dan Keuangan;
3. Kepala Bidang Pengendalian Penuluhan dan Penggerakan membawahi :
 - Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
4. Kepala Bidang Keluarga Berencana
 - Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
 - Seksi jaminan Pelayanan KB;
 - Seksi Pembinaan dan kesertaan KB;
5. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi :
 - Seksi Pemberdayaan keluarga Sejahtera
 - Seksi Bina Ketahanan Balita, Anak dan Lansia
 - Seksi Bina Ketahanan Remaja

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELURGA BERENCANAPerbup No. 48 Tahun 2023

BAB II

RENCANA STRATEGIS DPPKB KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis DP2KB Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 secara umum merupakan alat pengambilan keputusan dan sebagai langkah kongrit yang akan ditempuh diwaktu yang akan datang untuk mencapai sasaran ataupun yang diinginkan dengan memperhitungkan kondisi potensi, peluang dan kendala yang kemungkinan di hadapi, sehingga dapat di gunakan sebagai tolak ukur atas pelaksanaan suatu kegiatan dan mempermudah dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan.

Dalam rangka pelaksanaan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai instrumen pertanggung jawaban, perencanaan ini merupakan pengintergrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategis local, regional, nasional dan global serta berada dalam tatanan system dan kaidah manajemen nasional.

Maksud dan Tujuan dari rencana strategis untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPPKB (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga rencana strategis ini dapat memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit – unit organisasi dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, selain itu rencana strategis dapat mempermudah pengendalian, koordinasi, monitoring, analisis, evaluasi baik secara internal maupun eksternal.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka menjabarkan dan sekaligus mengimplementasikan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak terlepas dari sasaran strategis RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang Keluarga Berencana, maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator kinerja DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	85,55
2.	Meningkatkan kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	Meningkatnyakesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	Menurunya Angka kelahiran Total(TFR) Per WUS(15-49 tahun)	2,14
3.	Meningkatkanperan stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Meningkatnyaperan stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	PersentaseCakupan stakeholder yang terlibat dalam Program BANGGA KENCANA	45
4.	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Keluarga	MeningkatnyaKualitas Kesejahteraan Keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	63

Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani dalam 4 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur(PUS)
3. Meningkatnyaperan stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA
4. Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga

Maka pada logframe perencanaan integratif untuk pencapaian Misi 1 (satu) dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2022, dapat dilihat bahwa DP2KB Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada posisi tugas yang sesuai dengan sasaran ke-1 RPJMD dan di “Cascading” menjadi Tujuan dari DP2KB Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Kinerja Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel – 1.
Pencapaian Sasaran Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target / Capaian Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	Meningkatnya kesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	Menurunnya Angka kelahiran Total(TFR) Per WUS(15-49 tahun)	2,27 (Target) 2,53 (Capaian)	2,20 (Target) 2,39 (Capaian)	2,18 (Target) 2,13 (Capaian)	2,16 (Target) 2,24 (Capaian)	2,14 (Target)
2	Meningkatkan peran stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Meningkatnya peran stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Persentase Cakupan stakeholder yangterlibat dalam Program BANGGA KENCANA	78,00 (Target) 76 (Capaian)	30 (Target) 28 (Capaian)	35 (Target) 44,49 (Capaian)	40 (Target) 44,07 (Capaian)	45 (Target)
3	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	57 (Target) 56,1 (Capaian)	57,50 (Target) 56,20 (Capaian)	58,50 (Target) 63,35 (Capaian)	60 (Target) 66,96 (Capaian)	63 (Target)
4	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	80 (Target) 72,23 (Capaian)	85,10 (Target) 75,6 (Capaian)	85,40 (Target) 75,6 (Capaian)	85,55 (Target) 61,24 (Capaian)	86,70 (Target)

Berdasarkan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 DPPKB Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan alokasi anggaran semula sebesar Rp.30.183.332.367 ,00 yang mendukung pelaksanaan 4 (Empat) Program, dan 16(Enam Belas) Kegiatan dan 69 (Enam Pulu Sembilan) Sub Kegiatan. Setelah Anggaran Perubahan melalui APBD – P Tahun 2024 berubah menjadi Rp.34.505.040.734,00 dengan jumlah program sebanyak 4 (Empat) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 68 (Enam Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Adapun Realisasi belanja secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 29.745.372.305,00 (86,21%) dari total anggaran sebesar Rp 34.505.040.734,00

By: Hennie

2.3. RENCANA KINERJA

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara. Di dalam rencana kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang sasaran strategi, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Tahun 2025.

Rencana kinerja berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber Dana yang terbatas. Dengan Rencana kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan akan fokus dan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Tahun 2025

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN 2025	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)
1	Meningkatnyakesadaran ber-KB bagi Pasangan Usia Subur(PUS)	Menurunnya Angka kelahiran Total(TFR) Per WUS(15-49 tahun)	2,14	Indikator Kinerja Utama
2	Meningkatnyaperan stakeholder dalam Program BANGGA KENCANA	Persentase Cakupan stakeholder yang terlibat dalam Program BANGGA KENCANA	45	Indikator Kinerja Utama
3	MeningkatnyaKualitas Kesejahteraan Keluarga	Indek Pembangunan Keluarga	63	Indikator Kinerja Utama
4	Meningkatnya Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP DPPKB	85,55	Indikator Kinerja Utama

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPPKB

Dari uraian program dan kegiatan, masing-masing kegiatan memiliki pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara, namun besaran dari pendanaan tersebut akan disesuaikan dengan kekuatan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing Tahun Anggaran.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan indikatif Tahun 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara terinci pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Satuan	Target capaian	Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Persentase Pelayanan perkantoran	%	85,55	14.144.206.101
	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja DPPKB	Dokumen	177,00	1.000.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	5	450.000.000
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	50.000.000
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah Yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	250.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	Laporan	12	50.000.000
	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	50.000.000

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja	Dokumen/Laporan	40/12	150.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Laporan	12,00	8.485.425.215
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	55/14	8.185.425.215
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	25.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Laporan	12	250.000.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	1	25.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah(BMD) pada perangkat daerah	Dokumen	1,00	105.000.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan barang milik daerah yang direkonsiliasi	Dokumen	1	25.000.000
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan barang milik daerah yang dilakukan penatausahaan	Laporan	2	50.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	30.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN	Orang	10	50.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	50.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	100,00	464.629.800
	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis	3	100.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis barang logistik yang disediakan	Jenis/Paket	2	60.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan	Lembar	26.862	19.999.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Bahan Bacaan Koran	Eksemplar	440	9.630.000

	Perundang-undangan				
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket	Paket	5	175.000.000
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi	Laporan	30	200.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	75.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Pengadaan Barang pada DPPKB	Unit	23	150.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	75.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	75.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Bulan	12	1.834.920.508
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	414.888.200
	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	75.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.345.032.308
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Barang Milik daerah	Unit	171	2.054.230.678
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	11	1.906.329..000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	84	97.901.578

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	50.000.000
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENGENDALIAN PENDUDUK	1.Cakupan stakeholder yang terlibat dalam program KKBPK 2.Tersedianya dokumen grand design kependudukan	Persen Dokumen	45 1	6.426.495.000
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersediannya dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen	1	300.000.000
	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	75.000.000
	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan	6	75.000.000
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Dokumen	1	75.000.000
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kegiatan	80	75.000.000
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk di kabupaten Kutai Kartanegara	Persen	70	6.126.495.000
	Pembinaan Dan Pengawasan Pencatatan Dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1	1	4.679.025.000

	Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	100	100.000.000
	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1500	5.000	61.270.000
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	3	714.340.000
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	20 Dokumen	43	196.860.000
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen	3	225.000.000
	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	1	150.000.000
3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) cara modern Persentase Peserta KB Baru Cakupan angka unmet need Persentase akseptor MKJIP Persentase Drop Out (DO)	Persen Persen Persen Persen Persen	77.15 15.13 12.00 16.03 12.42	7.152.260.000
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE	Event	5	3.724.056.000
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	5	360.000.000
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	2	337.716.000
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	Laporan	1	373.000.000

		(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	22	2.453.340.000
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	5	200.000.000
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya kegiatan operasional KB di Lapangan	Desa	237	931.750.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	6	130.000.000
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kelompok	237	651.750.000
	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	1	50.000.000
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	12	100.000.000
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan	Tersedianya alat, obat dan kontrasepsi pada Fasilitas Kesehatan	Faskes	40	1.376.554.000

	Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Laporan	42,00	938.054.000
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	113.500.000
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	3	75.000.000
	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kab/Kota	12	100.000.000
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	6	150.000.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Be-KB	Cakupan ORMAS/POKJA	Persen	60	1.119.900.000
	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kampung KB	38	100.000.000
	Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	48	523.500.000
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	5	100.000.000
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	2	150.000.000
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana	Jumlah Kampung KB	38	246.400.000

		(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	bernilai baik		
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota BKB ber-KB Cakupan Anggota BKR ber-KB Cakupan Anggota BKL ber-KB Pusat Pelayanan KS (PPKS) Cakupan Remaja Dalam PIK-R/M Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS ber-KB	Persen Persen Persen Persen Persen Persen	63,31 72,97 57,32 2 50 56,09	6.201.850.000
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	Cakupan pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persen	30,72	2.656.750.000
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	30	330.000.000
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Orang	140	500.000.000
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	50	275.000.000
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)	Kelompok	394	600.000.000

	Akseptor (UPPKA)	Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan			
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	4	726.750.000
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	2	225.000.000
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan peran ORMAS dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persen	50	3.545.100.000
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	68	175.000.000
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	4	150.000.000
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	68	215.000.000

	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon Pus, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	12	1.574.100.000
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	12	1.431.000.000
	Total Pagu Anggaran				33.924.811.101

BAB IV PENUTUP

Perencanaan Kinerja merupakan salah satu tujuan dari akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2026 yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Rencana strategis 2021–2026 yang sifatnya tahunan, memuat sasaran, program / kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini merupakan komitmen Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government), dan menjadi arahan bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah sehingga pegawai dapat konsisten dan disiplin untuk merealisasikan Rencana Kerja ini sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Kegiatan yang diakomodasikan dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah seluruh kegiatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran dan menjadi pedoman perencanaan kinerja oleh seluruh aparatur di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025.

Tenggarong, Januari 2025,

Plt. Kepala Dinas,



DAFIP HARYANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip. 197009241990031001